



Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tagawiti Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata

Implementation of Family Hope Program (FHP) in Community Empowerment in Tagawiti Village, Ile Ape District, Lembata Regency

¹⁾ Maria Salvi Reya Lelangona, ²⁾ Fransina W. Ballo, ³⁾ Aldarine Molidya

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Email: ¹⁾ salvilelangona01@gmail.com, ²⁾ fwelhelmina@gmail.com, ³⁾ aldarine.molidya@staf.undana.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Maria Salvi Reya Lelangona

DOI:

10.59141/comserva.v3i09.1173

ABSTRAK

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tagawiti kurang efektif karena masih terdapat ketidakmaksimalan dalam empat faktor pendukung, seperti penggunaan bantuan untuk kebutuhan lain, ketidakvalidan data, dan kekurangan anggaran bagi KPM PKH, meskipun pendamping PKH telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tagawiti, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PKH di Desa Tagawiti belum maksimal sesuai dengan empat faktor pendukung dalam implementasi. Sesuai dengan teori kebijakan Edward III yang terdiri dari komunikasi yang ditunjukkan dengan adanya himbuan kepada KPM PKH di Desa Tagawiti supaya bijak dalam pemanfaatan bantuan, namun dalam pelaksanaannya KPM PKH di Desa Tagawiti masih menggunakan bantuan untuk kebutuhan lainnya dan masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH karena data yang tidak valid. Sumber daya manusia dari segi kualitasnya juga sudah kompeten, dari segi anggaran belum mencukupi kebutuhan KPM PKH, selanjutnya disposisi dalam penyaluran bantuan sikap pelaksana sangat baik dalam pelayanan. Dalam birokrasi Pendamping PKH di Desa Tagawiti telah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak dalam pelaksanaan Implementasi PKH yang ada di Desa Tagawiti.

Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan masyarakat, PKH

ABSTRACT

The implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tagawiti Village is less effective because there are still inadequacies in four supporting factors, such as the use of assistance for other needs, data invalidity, and budget shortfall for PKH KPM, even though PKH assistants have coordinated with related parties. This research was conducted to find out how the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tagawiti Village, Ile Ape District, Lembata Regency. The data used in this study are primary data and also secondary data, which are then analyzed using qualitative descriptive analysis methods. Data collection techniques used in this research use interview, observation and documentation techniques using Edward III's policy implementation theory. The results of this study show that the implementation of PKH in Tagawiti Village has not been

maximized by four supporting factors in implementation. By Edward III's policy theory which consists of communication shown by an appeal to KPM PKH in Tagawiti Village to be wise in the use of assistance, but in its implementation KPM PKH in Tagawiti Village still uses assistance for other needs and there are still many people who do not get PKH assistance because of invalid data. Human resources in terms of quality are also compatible, in terms of budget has not met the needs of KPM PKH, then the disposition in the distribution of assistance is very good in the attitude of implementers in service. In the bureaucracy, PKH Companions in Tagawiti Village have coordinated with several parties in the implementation of PKH Implementation in Tagawiti Village.

Keywords: *Implementation, Community empowerment, PKH*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Untuk menanggulangi kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif (Papilaya, 2020). Dalam hal ini ada dua strategi utama yang harus ditempuh oleh pemerintah yaitu melindungi keluarga dan masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah selama ini untuk memberikan peluang pada masyarakat miskin untuk mengurangi kemiskinan (Muhammad Fahreza W, 2022).

Upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di bidang Perlindungan Sosial, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti diatur dalam Pasal 1 ayat 9, UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial (Sari, 2020). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan (Makasenda et al., 2019). Program Keluarga Harapan (PKH) berada dibawah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), baik pusat maupun daerah (Bhinadi, 2017). Pada pelaksanaannya PKH ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga seperti, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kepala Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik (BPS), PT Pos Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberi bantuan tunai kepada Keluarga Miskin (KM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (Daud & Marini, 2018) (Daud, 2021). Syarat-syarat penerima PKH adalah: Keluarga miskin atau pra sejahtera, Memiliki komponen dengan kriteria ibu hamil dan menyusui, anak usia 0-6 tahun, anak-anak SD-SMA, lansia, disabilitas dan harus terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) (Franita et al., 2019).

Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. PKH di

desa Tagawiti telah dilaksanakan sejak tahun 2013. Dari data kependudukan di Desa Tagawiti sebanyak 661 orang yang terdiri dari 226 KK, dari 226 KK terdapat beberapa rumahtangga yang sangat miskin. Berdasarkan data kependudukan di desa Tagawiti rata-rata mata pencarian masyarakat disana adalah petani.

PKH di Desa Tagawiti mempunyai konsep sendiri untuk memberdayakan masyarakatnya yaitu dengan melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga peserta PKH. KPM diberikan modul untuk proses belajar, sehingga diharapkan dapat lebih mandiri. Dengan adanya konsep yang dilakukan oleh PKH di desa Tagawiti ini mampu memberdayakan masyarakat miskin tersebut. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan PKH membawa anggotanya ini, bisa terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai warga masyarakat. Seperti hak anak-anak sekolah, dan hak mendapat fasilitas kesehatan sehingga dengan adanya PKH mereka bisa sekolah dan mendapatkan layanan kesehatan.

Program Keluarga Harapan di Desa Tagawiti belum cukup berhasil. Masalah yang pertama yaitu, persebaran bantuan sosial PKH yang belum merata karena dari 229 KK yang ada di desa Tagawiti, yang mendapatkan bantuan PKH setiap tahun rata-rata hanya 50 lebih KK yang mendapatkan bantuan dari program tersebut, masalah kedua, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan PKH, masih ditemukan masyarakat yang perekonomiannya berkecukupan masih mendapatkan bantuan PKH, padahal juga banyak masyarakat yang kurang mampu dan memenuhi syarat tidak mendapatkan program bantuan tersebut dan masalah masalah ketiga penggunaan bantuan PKH juga belum optimal sesuai ketentuan (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial) (Maryani & Nainggolan, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tagawiti, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, untuk mengevaluasi sejauh mana PKH telah mencapai tujuan utamanya dalam mengurangi kemiskinan di Desa Tagawiti. Evaluasi akan mencakup aspek-aspek seperti distribusi bantuan, ketepatan sasaran, dan optimalitas penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan untuk mengeksplorasi dan menilai konsep pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan oleh PKH di Desa Tagawiti. Manfaat dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PKH di Desa Tagawiti. Informasi ini dapat digunakan untuk merumuskan perbaikan dan penyesuaian program guna mencapai hasil yang lebih optimal serta penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki atau memperkuat konsep pemberdayaan masyarakat dalam PKH. Hal ini akan memberikan kontribusi positif terhadap upaya memberdayakan masyarakat miskin agar dapat lebih mandiri secara ekonomi dan sosial.

Penelitian ini dapat memberikan pandangan mendalam terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi PKH di Desa Tagawiti, memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang dibutuhkan, temuan terkait ketidaktepatan sasaran dapat menjadi dasar untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kriteria penerima bantuan PKH. Hal ini dapat membantu meningkatkan akurasi dalam menentukan keluarga yang memang membutuhkan bantuan tersebut, dan penelitian ini dapat mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan bahwa bantuan PKH benar-benar digunakan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tagawiti serta memberikan panduan bagi perbaikan kebijakan sosial di tingkat yang lebih luas.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan studi kasus guna memperoleh berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data lewat wawancara maupun observasi untuk mengetahui sejauh mana implementasi program keluarga harapan di desa Tagawiti.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan Penelitian kualitatif deskriptif menurut (Sugiyono, 2018), adalah penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Fokus masalah penelitian ini berorientasi pada masalah penelitian yaitu Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di desa Tagawiti, dengan melihat empat faktor yang menjadi kriteria penting dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Mandolang, 2019), mengemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan variabel-variabel pelaksanaan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Anggraini, 2018). Pada teknik pengumpulan data penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan melakukan dokumentasi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tagawiti memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal ketepatan sasaran, data yang tidak valid, dan penggunaan bantuan yang belum sesuai dengan tujuan program. Selain itu, komunikasi yang belum berhasil, ketersediaan sumber daya finansial yang belum mencukupi, dan kekurangan efektivitas bantuan dalam mengatasi kemiskinan juga menjadi catatan kritis dalam pelaksanaan program ini. Selain itu, perlu perhatian lebih terhadap pemutakhiran data dan peningkatan kesadaran peserta terkait dengan pemanfaatan dana bantuan.

Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang paling mudah sebagai pengukur tingkat pendidikan sumber daya manusia atau penduduk pada suatu wilayah. Pendidikan akan berjalan dengan lancar apabila terdapat sarana dan prasarana pendidikan. Pembangunan dan perkembangan ditingkat desa memang perlu didukung oleh adanya peran serta masyarakat secara nyata karena hanya dengan dukungan masyarakat pembangunan di wilayah pedesaan dimungkinkan dapat berjalan secara lebih efektif (Endah, 2020). Untuk melihat kondisi penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	49
2	Tidak tamat SD (Sekolah Dasar)	46
3	Tamat SD	149
4	Masih SD	64
5	Masih SMP (Sekolah Menengah Pertama)	50
6	Tamat SMP	70
7	Masih SMA	52
8	Masih Kuliah	98
9	Tamat D3 dan S1	43
Total		661

Sumber data: Kantor Desa Tagawiti, 2023

Berdasarkan tabel 1 di atas tingkat pendidikan di Desa Tagawiti belum tergolong baik, karena sebagian besar masyarakat Desa Tagawiti hanya tamat SD. Hal ini menyebabkan minimnya tingkat pengetahuan masyarakat

Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat di Desa Tagawiti beranekaragam, pada umumnya masyarakat desa Tagawiti bermata pencaharian sebagai Petani, PNS, Nelayan, Pengusaha Kios, Guru, Pensiunan PNS, PNS, Pengusaha Jasa Transportasi, Bidan, dan Swasta. Jenis dan mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	417
2	Pegawai Negeri Sipil	20
3	Nelayan	45
4	Peternak	30
5	Pengusaha kios	4
6	Guru swasta	71
7	Pensiun PNS	7
8	Pengusaha jasa transportasi	9
9	Bidan	5
10	Swasta	27
11	PNS	26
Total		661

Sumber: Kantor Desa Tagawiti, 2023

Berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahwa di Desa Tagawiti profesi petani berada pada peringkat pertama yaitu mencapai angka 417 jiwa dari total mata pencaharian penduduk. Hal ini membuktikan bahwa sebagian masyarakat di Desa Tagawiti, menggantungkan hidupnya dengan bertani

Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi di Desa Tagawiti dari kondisi sumber daya alamnya terutama sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Sektor pertanian dan perikanan menjadi penopang utama

masyarakat Desa Tagawiti yang terlihat dari konsentrasi tenaga kerja pada sektor ini dan mata pencaharian utama masyarakatnya di sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian pada perekonomian Desa Tagawiti cukup berarti.

Penduduk Desa Tagawiti mayoritas petani yang hidup dari berladang dan berkebun. Teknik penggarapan di ladang masih bersifat tradisional dengan menggunakan peralatan sederhana seperti cangkul, tofa, parang dan lain-lain. Kegiatan berkebun dilakukan pada musim hujan yaitu sistem tadah hujan. Penanaman jagung secara tradisional dalam proses perkembangannya menerima unsur-unsur yang datang dari luar. Sejalan dengan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terus berkembang sehingga diterapkan dengan sistem panca usaha tani, seperti pembajakan tanah dengan traktor tangan, penggunaan bibit unggul, pemakaian pupuk, obat hama tanaman sistem pengairan serta pengolahan tanah. Selain bercocok tanam, penduduk Desa Tagawiti juga mengusahakan pekerjaan sampingan seperti beternak. Jenis hewan yang dipelihara adalah domba, kambing dan ayam.

Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Tagawiti Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata

Implementasi Program Keluarga Harapan adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan sesuatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Dewi, 2022). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan (Syahrial & Desrina, 2021). Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan agar dapat membantu masyarakat seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konsitusi (Mandolang et al., 2019). sehingga PKH memberikan akses pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan termasuk akses sebagai program perlindungan sosial yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan (Santi & Afdalli, 2020).

Pembahasan

Sosialisasi merupakan hal penting dalam tercapainya suatu program atau kebijakan Pemerintah. Sosialisasi tidak dapat terlepas dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan proses ketika warga mengambil peran serta untuk mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi hidup mereka.

Berdasarkan salah satu hasil wawancara dengan masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH mengatakan bahwa:

“Jadi selama ini saya tidak dapat itu bantuan PKH. untuk pertemuan dengan pemerintah desa juga belum pernah diadakan, tetapi kalau untuk kumpul data kami, RT datang kerumah untuk ambil data tapi sampe sekarang belum dapat-dapat juga ini bantuan PKH ini mungkin data yang d pake selama ini data lama”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa PKH di Desa Tagawiti masih belum tepat sasaran karena masyarakat yang tidak terima bantuan beranggapan bahwa kementerian sosial masih menggunakan data lama atau nama-nama tersebut merupakan nama-nama penerima bantuan yang sudah pernah ada sebelumnya yang belum diperbaharui oleh pusat kementerian sosial. Sehingga Masih

ada beberapa warga miskin yang seharusnya berhak menerima bantuan tetapi nama mereka tidak terdaftar di pusat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan orientasi utama PKH yaitu memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Hasil wawancara bersama Bapak Kornelis Kukak selaku Kepala Desa Tagawiti menyatakan bahwa konteks pengolahan dan pemutakhiran data, merupakan hal yang esensial karena semua keberhasilan program bergantung dari baik atau buruknya data. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa sumber masalah utama program penanggulangan kemiskinan adalah banyak data salah sehingga sasaran program menjadi kurang tepat bahkan menimbulkan konflik di masyarakat. sistem pemutakhiran yang sensitif dengan kondisi *real* di lapangan. Untuk masalah updating data, maka sinergi antara pemerintah daerah (sampai tingkat desa) dengan Kementerian Sosial dengan mengoptimalkan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi kunci utamanya. *Update* data dilakukan setiap bulan untuk menjamin akurasi guna menghindari salah sasaran penerima bantuan. Menyikapi masalah sistem, maka sebaiknya otoritas verifikasi dan validasi data sebaiknya diserahkan kepada daerah, kabupaten maupun provinsi, meskipun indikator kemiskinan masih tetap menjadi kewenangan pusat. Adanya bantuan pemerintah kepada KPM PKH sangat dibutuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka secara layaknya seperti mendapatkan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan bagi anggota keluarga.

Berdasarkan hasil salah satu dari wawancara dengan Masyarakat penerima KPM PKH mengatakan bahwa:

“Untuk bantuan PKH ini saya rasa sedikit membantu. Kami KPM PKH setiap bulan rutin melakukan sosialisasi dengan Ibu pendamping. Pada saat memberikan sosialisasi kepada kami Ibu pendamping selalu menjelaskan tentang cara penggunaan uang serta kewajiban sebagai KPM. Untuk dana yang diberikan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak saya kadang uang bantuan juga saya gunakan untuk kebutuhan lainya misal nya bayar utang di kios.”

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu penerima bantuan PKH menyatakan bahwa sedikit membantu meringankan beban hidup KPM PKH untuk membiayai fasilitas pendidikan anak mereka. akan tetapi uang bantuan tersebut masih ada sebagian KPM PKH menggunakan bantuan tersebut untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, tidak salah karena kondisi mereka yang terbilang kekurangan memilih menggunakan bantuan tersebut sebagian untuk keperluan lain. Untuk itu pemerintah serta pihak yang terkait didalamnya sebagai pelaksana kebijakan ini harus dilakukan pemantauan agar upaya penyalahgunaan bantuan dapat diminimalisir, artinya penggunaan bantuan benar-benar sesuai dengan harapan seperti melaksanakan segala komitmen yang menjadi tanggung jawabnya sehingga angka kemiskinan yang ada dapat diminimalisir melalui bantuan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pendamping PKH di Desa Tagawiti mengatakan bahwa:

“Sebelum saya melakukan sosialisasi kepada KPM PKH, saya menyampaikan informasi kepada aparat desa untuk dikoling bahwa akan diadakannya pertemuan dengan KPM PKH di kantor desa. Dalam melakukan pertemuan ini saya selaku pendamping PKH selalu memberikan sosialisasi tentang pemanfaatan dana PKH dan juga memberikan sosialisasi tentang hak dan kewajiban mereka sebagai KPM PKH. KPM PKH dulunya kurang mengerti tentang pemanfaatan dana bantuan PKH ini tapi sekarang tiap bulan rutin dilakukan pertemuan dengan KPM PKH sehingga sekarang hampir seluruh KPM PKH sudah mulai mengerti tentang pemanfaatan uang bantuan PKH ini namun dalam

pelaksanaannya pemanfaatan dana bantuan tersebut masih mereka gunakan untuk kebutuhan lainnya.”

Berdasarkan fenomena di lapangan pada proses sosialisasi yang ada di Desa Tagawiti belum berjalan dengan baik, pendamping melakukan pertemuan pada KPM PKH dan menjelaskan secara langsung apa itu Program PKH, kegunaan dana PKH dan membuat materi khusus untuk peserta sehingga banyak peserta yang sudah paham dalam penyampaian sosialisasi yang diadakan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat KPM PKH yang menggunakan uang bantuan tersebut untuk kebutuhan lainnya. Dengan melihat realita seperti di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi PKH di Desa Tagawiti dalam hal komunikasi belum maksimal karena masih ditemukan KPM PKH yang menggunakan uang bantuan tersebut untuk kebutuhan lainnya. Untuk itu pemerintah serta pihak yang terkait didalamnya sebagai pelaksana kebijakan ini harus dilakukan pemantauan secara terus menerus dalam upaya penyalahgunaan bantuan sehingga dapat diminimalisir, artinya penggunaan bantuan benar-benar sesuai dengan harapan seperti melaksanakan segala komitmen yang menjadi tanggung jawabnya sehingga angka kemiskinan yang ada dapat diminimalisir melalui bantuan PKH ini (Ferezagia, 2018).

Pernyataan dari pendamping PKH lainnya menyatakan bahwa:

“Menurut saya Ina bantuan PKH ini belum cukup membantu mama karena anak saya yang sekolah itu ada empat orang jadi untuk bayar uang iuran sekolah saja masih kurang Bantuan ini kami terima bukan tiap bulan tapi tiga bulan sekali Ina.”

Dari pernyataan pendamping PKH dan KPM PKH diatas dapat dilihat bahwa besaran bantuan bagi KPM PKH belum cukup membantu perekonomian KPM PKH di Desa Tagawiti khususnya terkait dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi KPM PKH di Desa Tagawiti. Berikut ini adalah skema besaran bantuan bagi KPM PKH.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian dari isi kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan menimbulkan banyak masalah. Sikap dan respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana petunjuk atau arah pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun sering kali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Peran pendamping PKH sangat menentukan keberhasilan program. Peran dan keterampilan yang dilakukan pendamping PKH antara lain: fasilitasi, pendidik, perwakilan dan teknika meskipun tidak semua peran dan keterampilan yang dilaksanakan oleh Pendamping PKH karena sangat dipengaruhi situasi dan kondisi lingkungan sehingga kualitas dan fleksibilitas Pendamping PKH menjadi penentu pelaksanaan di lapangan.

Implementasi PKH di Desa Tagawiti

Teori implementasi kebijakan menurut Edward III dalam mengukur implementasi kebijakan terdapat empat faktor pendukung yang menjadi poin penting agar implementasi dapat berjalan dengan

baik. Faktor tersebut terdiri dari komunikasi yang merupakan proses penyampaian informasi dalam menjalankan kebijakan, faktor sumber daya yang merupakan segala sumber yang digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, faktor disposisi yang berkaitan dengan perilaku atau karakteristik pelaksanaan kebijakan dan yang terakhir faktor struktur birokrasi yang berkaitan dengan mekanisme kebijakan.

Komunikasi

Penyampaian informasi kepada KPM PKH di Desa Tagawiti sangatlah penting yang dimana dapat menentukan berhasil tidaknya tujuan PKH di Desa Tagawiti. Komunikasi diperlukan agar pembuat kebijakan dan pelaksana rencana lebih konsisten dalam mengimplementasikan setiap rencana yang akan diterapkan pada tujuan perencanaan. Proses komunikasi kepada KPM PKH memiliki peranan penting terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan program PKH. Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menganalisis bahwa komunikasi yang dilakukan dalam penyampaian informasi pada saat sosialisasi kepada KPM PKH di Desa Tagawiti belum berhasil hal ini dilihat dari hasil wawancara KPM PKH dengan pendamping PKH yang memberikan informasi terkait himbauan mengenai bagaimana sebaiknya bantuan tersebut dipergunakan sesuai dengan tujuan dibuatnya program PKH tersebut, sehingga KPM PKH lebih terarah namun dalam pelaksanaannya masyarakat masih menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan lainnya dan masih banyak Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan dikarenakan data yang tidak valid.

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori Edward III karena komunikasi di Desa Tagawiti belum berhasil karena pendamping PKH di Desa Tagawiti setiap bulan rutin melakukan sosialisasi kepada KPM PKH tentang penggunaan bantuan namun dalam pelaksanaannya KPM PKH di Desa Tagawiti masih menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan lain misalnya pesta adat (Dagel) dan membayar utang di kios dan masih banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan karena data yang tidak valid sehingga bantuan PKH ini belum merata.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi rutin dilakukan oleh pihak dinas sosial dan juga pendamping, hanya saja belum adanya kesadaran peserta, kurangnya pemahaman peserta, dan dilihat dari kondisi ekonomi KPM PKH yang masih serba kekurangan, maka PKH ini dinilai kurang efektif dalam mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Silih Nara. Begitu juga dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu Komunikasi di Desa Tagawiti belum berhasil KPM PKH di Desa Tagawiti masih menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan lain dan masih banyak masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan karena data yang tidak valid sehingga bantuan PKH ini belum merata.

Sumber Daya

Sumber daya yang utama dalam implementasi PKH adalah sumberdaya manusianya (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh sumber daya yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten Dalam proses penyaluran bantuan PKH yang dilaksanakan pendamping PKH untuk mendampingi KPM PKH pada saat berlangsungnya penyaluran bantuan. Tugas utama dari pendamping PKH adalah verifikasi validasi calon penerima bantuan sosial, penyaluran bantuan sosial, verifikasi komitmen, pemutakhiran data, pertemuan bulanan untuk Melakukan pendampingan kepada KPM PKH dalam proses perubahan perilaku, pola pikir yang

mandiri, produktif dan melakukan fasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PKH.

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori Edward III karena sumber daya finansial yang diterima KPM PKH di Desa Tagawiti belum bisa membantu masyarakat keluar dari kemiskinan hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari PKH belum tercapai. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mandolang *et.all* (2019) yang menyatakan bahwa pegawai untuk pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, sudah cukup baik dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Begitu juga dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu Proses Pendampingan yang dilakukan pendamping PKH di Desa Tagawiti sudah sangat baik karena sudah menjalankan tugas sesuai yang dibutuhkan KPM PKH di Desa

Tagawiti. Kinerja dari pendamping PKH di Desa Tagawiti juga sangat berkompeten dalam bidangnya karena pendamping PKH direkrut langsung oleh Kementerian Sosial

Disposisi

Pada saat proses pendampingan KPM PKH di Desa Tagawiti merasa bahwa pelayanan yang diberikan oleh pendamping PKH di Desa Tagawiti sangat baik, sehingga KPM PKH merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. KPM PKH beranggapan bahwa pemerintah telah memperhatikan nasib mereka yang merupakan warga miskin, yang penghasilannya sangat tidak menentu.

Penelitian ini sesuai dengan teori Edward III karena salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Program Keluarga Harapan adalah sikap implementor. Pada saat proses pendampingan KPM PKH di Desa Tagawiti merasa bahwa pelayanan yang diberikan oleh pendamping PKH sangat baik, sehingga KPM PKH di Desa Tagawiti merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mandolang *et.all* (2019) yang menyatakan bahwa di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, disposisi (sikap pegawai) dalam melaksanakan program keluarga harapan sudah cukup baik dilihat dari komitmen, konsistensi, kejujuran, dan sikap demokratis. Begitu juga dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sikap implementor pada saat proses pendampingan, KPM PKH di Desa Tagawiti merasa bahwa pelayanan yang diberikan oleh pendamping sangat baik, sehingga KPM PKH di Desa Tagawiti merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Struktur Birokrasi

Pelaksanaan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tagawiti sudah optimal, yang dijalankan oleh pelaksana PKH telah terlaksana dengan baik. Prosedur yang dijalankan oleh pelaksana PKH di Desa Tagawiti termuat dalam buku pedoman PKH. Prosedur atau aturan yang ada dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan tidak hanya berlaku untuk para pelaksana tetapi berlaku juga untuk KPM PKH. Pendamping PKH di Desa Tagawiti melakukan koordinasi dengan beberapa pihak dalam pelaksanaan implementasi yaitu pihak Sekolah untuk komponen pendidikan, pihak Puskesmas untuk komponen kesehatan. Setiap satu bulan sekali pendamping akan melakukan pengontrolan di posyandu, pendamping akan mendapatkan informasi dari pihak terkait tentang peserta PKH. Dengan adanya koordinasi membuat proses implementasi PKH berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

1) Maria Salvi Reya Lelangona, 2) Fransina W. Ballo, 3) Aldarine Molidya

Implementation of Family Hope Program (FHP) in Community Empowerment in Tagawiti Village Ile Ape District Lembata Regency

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mandolang *et.all* (2019) yang menyatakan bahwa di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program keluarga harapan sudah tertata dengan baik dan efektif dilihat dari mekanisme pelayanan yang mempunyai SOP (*Standard Operating Procedur*) yang jelas, sistimatis dan mudah dipahami oleh para pelaksana, serta mudah diikuti atau dilakukan oleh masyarakat, serta dilihat dari struktur organisasi dan pembagian kerja yang tertata dengan baik dan jelas. Begitu juga dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu Pendamping PKH di Desa Tagawiti telah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak dalam pelaksanaan implementasi PKH yang ada di Desa Tagawiti yaitu pihak sekolah untuk komponen Pendidikan, pihak Puskesmas untuk Komponen Kesehatan.

SIMPULAN

Komunikasi dalam Implementasi program keluarga harapan di Desa Tagawiti belum maksimal. Pendamping telah melakukan tugasnya dengan baik. Pendamping melakukan pertemuan rutin tiap satu bulan sekali bersama KPM PKH untuk melakukan sosialisasi tentang PKH, pendamping sudah rutin melakukan sosialisasi tentang penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan PKH akan tetapi masih ada KPM PKH yang menggunakan dana bantuan tersebut untuk kebutuhan lainnya misalnya untuk pesta adat (Dagel) dan membayar utang di kios.

Sumber daya manusia adalah sumber daya pelaksana program yaitu pendamping PKH. Pendamping PKH merupakan sumber daya yang telah disiapkan oleh Kementerian Sosial melalui proses seleksi yang sangat akurat. Setelah melakukan proses seleksi yang diadakan oleh Kementerian Sosial para pendamping selanjutnya akan melaksanakan pelatihan atau training terlebih dahulu sebelum menjalankan tugas, dengan adanya proses seleksi yang akurat dan pelatihan atau *training* yang baik sehingga pendamping PKH bisa berkompeten dalam bidangnya agar Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tagawiti terlaksanakan dengan baik.

Sumber daya finansial yang menjadi faktor utama dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program adalah sumber daya finansial, suatu program memerlukan biaya yang cukup untuk menghasilkan program yang berkualitas. Besaran bantuan bagi KPM PKH belum cukup membantu perekonomian KPM PKH di Desa Tagawiti khususnya terkait dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi KPM PKH di Desa Tagawiti. Masing-masing KPM PKH berbeda-beda dalam mendapatkan bantuan. Dalam penerimaan bantuan PKH diberikan per triwulan atau setahun empat kali pencairan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Program Keluarga Harapan adalah sikap implementor. Pelaksanaan disposisi dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tagawiti sudah optimal. Hal tersebut karena tugas dan fungsi pendamping PKH dalam implementasi PKH sudah berjalan dengan baik. Selain itu pendamping PKH di Desa Tagawiti selama proses pendampingan sangat ramah dengan peserta PKH sehingga KPM PKH merasa nyaman saat menyampaikan masalah atau hambatan yang dialami.

¹⁾ Maria Salvi Reya Lelangona, ²⁾ Fransina W. Ballo, ³⁾ Aldarine Molidya

Implementation of Family Hope Program (FHP) in Community Empowerment in Tagawiti Village Ile Ape District Lembata Regency

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. (2018). Faktor-Faktor Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sako Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 3(3).
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Daud, M. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Serambi Akademica*, 9(4), 620–624.
- Daud, M., & Marini, Y. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2(1), 29–38.
- Dewi, M. (2022). *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1.
- Franita, R., Harahap, A. F. D., & Sukriah, Y. (2019). Analisa Pengangguran Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 88–91.
- Makasenda, J. V., Kaunang, M., & Rachman, I. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Manado (Suatu Studi Di Kecamatan Tuminting). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Mandolang, Y., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79).
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Muhammad Fahreza W, S. (2022). *Pengantar Ekonomi Makro: Bintang Pustaka*. Bintang Semesta Media.
- Papilaya, J. (2020). Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 4(1).
- Santi, N., & Afdalli, M. (2020). Aspek-Aspek Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pada Desa Binturu Dan Desa Masintan). *Al'iidara Balad*, 2(1).
- Sari, N. I. (2020). *Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Pemerataan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh*
-

1) Maria Salvi Reya Lelangona, 2) Fransina W. Ballo, 3) Aldarine Molidya

Implementation of Family Hope Program (FHP) in Community Empowerment in Tagawiti Village Ile Ape District Lembata Regency

Tengah. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Syahrial, S., & Desrina, T. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 1(3), 58–74.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Poin lampiran Ke-46 Tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan Poin Lampiran Ke-1 Tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi penganggulangan Kemiskinan, No 31/MENKO/- KESRA/IX/2007 Tentang Tim pengendalian Program Keluarga Harapan, Tanggal 21 September 2007.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No .02A/HUK/2008 tentang Tim pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008 Tanggal 08 Januari 2008.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi penganggulangan Kemiskinan, No 31/MENKO/- KESRA/IX/2007 Tentang Tim pengendalian Program Keluarga Harapan, Tanggal 21 September 2007.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No .02A/HUK/2008 tentang Tim pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementrian sosial.

Pasal 1 Ayat (9) Uu No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyandang Disabilitas



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).